

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama suatu Negara, pendapatan ini didistribusikan kepada instansi pemerintah bertujuan untuk membayar pembelajaan rutinitas Negara dan pembangunan nasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), maka peraturan-peraturan pelaksanaan dibawahnya juga harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Penerbitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tersebut menimbulkan dampak pada perubahan aturan-aturan dibidang penagihan pajak dikarenakan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur mengenai penagihan pajak juga berubah.

Secara umum tentang Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Bagian dalam Kantor Pelayanan Pajak Kantor konvensional terdiri dari 13 seksi, yaitu : Subbagian Umum, Seksi Tata Usaha Perpajakan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Seksi Pajak Penghasilan

Orang Pribadi, Seksi Pajak Penghasilan Badan, Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, Seksi Pajak Pertambahan Nilai, Seksi Penagihan, Seksi Penerimaan dan Keberatan, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-IV (Waskon), Kelompok Jabatan Fungsional.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Kementerian Negara dilingkungan Pemerintah Indonesia yang mengelola keuangan Negara dan membantu pimpinan Negara dalam bidang keuangan dan kekayaan Negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dapat dikatakan sebagai penjaga keuangan Negara (Negara Dana Raksa). Kementerian Keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan (Menkeu) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Bambang Brodjonegoro. Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital didalam suatu negara untuk melakukan pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Memilih Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo bermanfaat sebagai tempat melakukan proses magang karena Kementerian Keuangan mempunyai tanggung jawab dibidang perpajakan dan mempunyai cita-cita di masa depan ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau konsultan pajak. Oleh karena itu, ingin

memperdalam ilmu pengetahuan didunia pekerjaan perpajakan dengan perundang-undangan yang saat ini. Salah satu tanggung jawab berkaitan dengan penagihan pajak yang disaat ini Wajib Pajak belum mengetahui Undang-Undang perpajakan yang tepat dan banyak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.

Di era globalisasi saat ini sangat terkenal dengan permasalahan tentang penagihan pajak. Lama-kelamaan dari tahun ke tahun adanya tunggakan pembayaran pajak semakin ketat dan diwajibkan oleh Kementerian Keuangan untuk membayarnya sehingga terjadilah penagihan pajak. Sebagai contoh: banyaknya perusahaan kecil, menengah, dan besar mengalami kebangkrutan atau penyitaan aset oleh Negara karena memiliki tunggakan pajak yang belum dibayarkan sebesar triliunan. Di daerah Negara terbesar sebelum tahun 2014 peraturan perundang-undangan tidak terlalu ketat sehingga menimbulkan penunggakan pajak yang sangat tidak wajar. Tetapi saat ini semua Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diharuskan membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku

Memilih topik ini daya tarik di dalam penagihan pajak yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia tidak pernah mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak mau tidak mau harus membayar pajak, banyak melakukan penyimpangan yang dilanggar, banyak Wajib Pajak tidak melaporkan dananya ke Kantor Pajak terdekat sehingga tidak dikenakan denda atau sanksi, mengambil data untuk sebagai

penelitian dan dibahas, dan memahami aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas penerapan penunggakan pajak aktif di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup magang adalah menganalisis dan mengamati peningkatan realisasi efektivitas dan kontribusi tiap 3 (tiga) tahun terakhir sebelum melakukan penagihan pajak serta sesudah melakukan penagihan pajak, meneliti rasio efektivitas dan kontribusi dapat diperhitungkan dengan semaksimal mungkin.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada semua pihak yang bersangkutan seperti:

1. Manfaat Akademik

Dapat dijadikan sumber referensi ilmiah dan sebagai sumber informasi mengenai efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo dan diharapkan hasil penelitian ini tidak berhenti disini saja tetapi dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik.

2. Manfaat Kementerian Keuangan (Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo)

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemegang untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam dunia bekerja di jaman sekarang ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo. Hal lain yaitu diharapkan penelitian ini berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo sebagai evaluasi perusahaan dan pegawai yang diperoleh agar sistem yang sudah dapat berjalan lebih baik.

1.4 Sistematika Penelitian

Berikut adalah inti dari sistematika penelitian laporan tugas akhir magang yang terdiri dari:

BAB 1: Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar awal untuk menuju ke bab selanjutnya yang berisikan tentang latar belakang, ruang lingkup, manfaat penelitian.

BAB 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini isi tentang teori yang berkaitan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak aktif, dan rerangka berpikir.

BAB 3: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan, alat dan metode pengumpulan data, objek magang dan prosedur analisis data yang digunakan dalam laporan.

BAB 4: Analisis dan Pembahasan

Bab ini adalah gambaran umum Kementerian Keuangan, profil Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo, visi, misi, budaya, tujuan Kementerian Keuangan, deskripsi data, *job description*, kebijakan Kementerian Keuangan, analisis dan pembahasan.

BAB 5: Simpulan dan Saran

Bab ini adalah simpulan dan saran